



## Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli

Serilis <sup>a,1</sup> Tri Budiarmo <sup>a,2</sup> Herkulanus Andre <sup>a,3</sup> Yuliana Yani <sup>a,4</sup> Argius Stepen Ananda <sup>a,5</sup>  
 Yulius Nyipa <sup>a,6\*</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pamane Talino Ngabang, Indonesia

<sup>1</sup> nyipaterry1988@gmail.com \*

\*korespondensi penulis

---

Informasi artikel

*Received: 3 Januari 2022;*

*Revised: 18 Januari 2022;*

*Accepted: 25 Januari 2022.*

Kata-kata kunci:

Etika Politik;

Kehidupan Bermasyarakat;

Pandangan Machiavelli.

---

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan etika politik menurut Machiavelli. Etika politik adalah dalam konteks ini ada untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi masyarakat yang baik. Moralitas terkait dengan beberapa aspek hal. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang pemahaman etika politik. Teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumen dan sumber pustaka. Studi pustaka ini identik dengan pengumpulan data berupa dokumen. Sumber data yang dipakai di sini ialah sumber sekunder, yang artinya sumber-sumber yang tidak langsung melihat kejadian atau responden. Hasil penelitian menemukan bahwa etika politik merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki, dipahami oleh mereka yang terlibat dalam politik atau oleh politisi. Strategi dan kebijakan politik digunakan untuk menguji pentingnya pemimpin yang baik, maka setiap orang harus memahami etika politik. Etika politik itu sendiri berarti ketertiban, tata cara, moralitas, baik atau buruk, dari tata cara atau tataran nyata yang digunakan oleh individu atau kelompok politik. Politik sebagai sistem pengaturan masyarakat muncul secara spontan atas dasar kebutuhan masyarakat akan politik.

---

ABSTRACT

*The Political Ethics in Community Life According to Machiavelli's View. The purpose of this study is to describe political ethics according to Machiavelli. Political ethics is in this context to do good deeds and be a good society. Morality is related to several aspects of things. The research method uses descriptive qualitative methods about understanding political ethics. Data collection techniques are through documents and library sources. This literature study is synonymous with data collection in the form of documents. The data source used here is a secondary source, which means sources that did not directly see the incident or the respondent. The results of the study found that political ethics is an important component that is owned and understood by those involved in politics or by politicians. Political strategies and policies are used to test the importance of a good leader, so everyone must understand political ethics. Political ethics itself means order, procedure, morality, good or bad, of the real order or level used by individuals or political groups. Politics as a system of social regulation appears spontaneously on the basis of the people's need for politics.*

---

Keywords:

Political Ethics;

Social Life;

Machiavelli's View.

---

Copyright © 2022 (Serilis, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Duhat, B. Y., & Kurnia, F. Katekese Orang Muda di Era Covid. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i1.1245>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Kata-kata seperti moral, etika, dan etika tidak terdengar di ruang kuliah dan tidak menjadi hak eksklusif civitas akademika. Di luar kaum intelektual, kita sering membicarakan hal-hal seperti itu. Benar, dalam percakapan antar pasar atau antar penumpang, kata-kata ini jarang muncul. Tetapi jika kita membuka koran atau majalah, kita menemukan kata-kata ini hampir setiap hari. Berkali-kali kita membaca ungkapan seperti ini: Dalam dunia bisnis, etika terus merosot, etika dan moralitas harus ditegaskan kembali (Muhammad, & Hambali, 2021).

Di zaman Orde Baru, kita sering mendengar tentang etika Pancasila dan etika pembangunan. Tetapi juga hari ini, dalam pidato pejabat pemerintah dan politisi lainnya, kata-kata etika dan moralitas banyak digunakan. Singkatnya, kata-kata seperti ini mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat menambahkan bahwa kata-kata ini tidak bekerja dalam suasana yang biasa dan sepele, tetapi sebaliknya dalam konteks yang serius dan kadang-kadang bahkan sangat prinsip. Ketika kita berbicara tentang etika dan moralitas, kita berarti sesuatu yang penting. Buku ini tentang etika, dan dalam hal ini, etika dipahami sebagai filsafat moral, tetapi kata etika tidak selalu digunakan dalam pengertian itu. Jadi yang terbaik adalah memulai dengan meneliti cara kata tersebut digunakan, serta beberapa istilah terkait lainnya (Riyantie, 2020).

Moralitas melekat pada setiap individu. Etika sendiri merupakan asas yang berkaitan dengan etika manusia yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika sangat penting bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya secara sosial, tetapi moralitas itu sendiri diperlukan dalam politik. Sebagai negara yang berbasis aturan, di Indonesia banyak orang yang tidak memiliki moral yang baik. Bahkan di kalangan politisi di Indonesia, dalam politik diperlukan moralitas agar tidak menjadi politik yang brutal dan kotor. Politik kotor itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap negatif oleh masyarakat. Politik kotor memiliki kenyataan pahit di mana, dalam bidang kehidupan tertentu, aktivisme politik itu sendiri dipandang tidak sehat (Azra, 2019).

Moralitas melekat pada setiap individu. Etika sendiri merupakan asas yang berkaitan dengan etika manusia yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika sangat penting bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya secara sosial, tetapi moralitas itu sendiri diperlukan dalam politik. Sebagai negara yang berbasis aturan, di Indonesia banyak orang yang tidak memiliki moral yang baik. Bahkan di kalangan politisi di Indonesia, dalam politik diperlukan moralitas agar tidak menjadi politik yang brutal dan kotor. Politik kotor itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap negatif oleh masyarakat. Politik kotor memiliki kenyataan pahit di mana, dalam bidang kehidupan tertentu, aktivisme politik itu sendiri dipandang tidak sehat.

Machiavelli adalah seorang pemikir politik dan sosial yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan politik Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Machiavelli memperingatkan para pangeran untuk menjauh dari penyanjung dan meminta nasihat tentang apa yang pantas. Machiavelli mengembangkan filosofi yang disebut "Perang Terbatas". Artinya, jika diplomasi gagal, maka perang adalah perpanjangan dari politik. Machiavelli meninggal pada 21 Juni 1527, pada usia 58 tahun. Dia dimakamkan di Gereja Salib Suci (Gereja Santa Croce).

Landasan Teori dari penelitian ini dimulai dari penjelasan tentang Etika. Etika adalah falsafah tindakan manusia sebagai manusia, ini berhubungan langsung dengan tindakan atau perilaku manusia yang memiliki nilai-nilai yang baik. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Selanjutnya, etika juga menilai tentang baik atau buruk yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat.

Tujuan dari etika adalah untuk memimpin orang untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi masyarakat yang baik. Moralitas terkait dengan beberapa aspek hal. Yang pertama adalah etika yang berkaitan dengan logika dan estetika, dimana logika adalah norma yang jelas yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat normal. Estetika memiliki prinsip keindahan dan ritme Kedua, hubungan antara etika dengan ilmu-ilmu filsafat lainnya. Ini memiliki karakteristik praktis seperti hukum dan politik.

---

Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa etika dan politik memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Menurut konsep Aristoteles Moralitas adalah kebajikan itu sendiri, itu menggambarkan setiap aktivitas manusia ada tujuan yang baik. Politik, menurut Cholisin (2003;2) secara etimologis, pada bahasa Yunani politik dari menurut istilah polis yang berarti negara kota, lalu berkembang sebagai *politie* yang berarti rakyat negara, politikus yang berarti kewarganegaraan dan *politike techne* yang berarti kemahiran politik. Politik adalah interaksi hubungan pemerintah menggunakan masyarakat.

## Metode

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang pemahaman etika politik. Teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumen dan sumber pustaka. Studi pustaka ini identik dengan pengumpulan data berupa dokumen. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai sumber data. Sumber data yang dipakai di sini ialah sumber sekunder, yang artinya sumber-sumber yang tidak langsung melihat kejadian atau responden. Maksudnya, data yang diperoleh bukan dari usaha sendiri oleh penulis, melainkan diperoleh dari naskah-naskah, artikel-artikel, majalah, buku-buku serta sumber tertulis lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

Politik adalah suatu upaya ideologis dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, menjalankan fungsi pemerintahan, menetapkan kewajiban dan hak, serta mengawasi penguasa untuk mengikuti ketika mereka melakukan sesuatu yang baik dan dikritik ketika mereka melakukan hal-hal yang buruk. Tidak hanya urusan dalam negeri rakyat, tetapi juga urusan luar negeri, seperti pemeliharaan kemerdekaan dan kebebasan bangsa, berusaha untuk mencapai tujuan adalah berdiri di tengah-tengah negara lain.

Politik disebut juga seni karena banyak politisi yang tidak terdidik dalam politik tetapi dapat mengarahkan roda politik yang sesungguhnya. Menurut, politik kotor adalah cara pemahaman yang memisahkan moralitas dari politik. Dimana moralitas adalah ranah penilaian seseorang antara dosa dan bukan dosa. Sementara itu, politik hanyalah ranah kekuasaan.

Menurut Machiavelli) menyatakan bahwa politik tidak hanya menyangkut kekuasaan atau ekonomi. Tapi bidang kehidupan melibatkan semua hubungan manusia. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, negara dan semua proses yang ada tidak dapat dipisahkan dari politik. Oleh karena itu, kebijakan sendiri memiliki arti yang sangat luas.

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan masyarakat, maka etika politik adalah standar nilai yang diabstraksikan dari nilai-nilai masyarakat, sebagai kerangka acuan teoretis mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik dan budaya politik terdaftar. Oleh karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara, negara, hukum yang berlaku.

Etika politik adalah sebuah upaya, kata Muhammad Nazaruddin Perluasan lebih lanjut dari kebebasan dan penciptaan institusi yang lebih adil. Definisi tersebut mengacu pada poin-poin berikut, pertama-tama, Ruang lingkup kebebasan yang dimaksud tentu saja kebebasan sosial politik, Mengacu pada kondisi fisik, sosial dan politik yang diperlukan untuk implementasi Kebebasan khusus, termasuk jaminan hak. Ini termasuk Kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara pendapat dengan menciptakan sistem yang lebih adil, karena tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial.

Menurut Arkoun, etika politik adalah pentingnya penelitian politik, yaitu Nuansa akademik ketimbang mengutamakan penelitian sejarah secara kronologis hanya. Arkoun juga menekankan pentingnya pemerintah Lakukan dengan menggunakan logika akademik daripada logika politik murni. Dia juga mengkritik ulama yang hanya tampak sah Terhadap pemerintahan yang jelas-jelas menyimpang dari kebenaran.

---

Arkoun juga mengkritik fundamentalis yang berlindung di balik slogan-slogan kebangkitan Islam. Demikian juga pentingnya landasan pembangunan suatu bangsa yang bertumpu pada kekuatan budaya dan intelektualitas, bukan hanya pembangunan fisik. Arkoun membedakan antara konsep otoritas dan kekuasaan, selain itu ia mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan gelar Islam feodal, di mana banyak penguasa memanipulasi simbol-simbol agama atau mencari keuntungan politik atas nama Tuhan mereka.

Politik dan etika memiliki inti yang permanen (abadi), yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat kehidupan manusia. Hubungan antara politik dan moralitas di jantung, yang sekilas terlihat, menjadi rumit jika dilihat dari perspektif praktis kehidupan masyarakat saat ini. Etika memiliki tujuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sedangkan ilmu spekulatif lainnya berhubungan dengan aktivitas manusia tertentu. Seperti halnya logika, hal ini jelas berkaitan dengan cara kerja pikiran manusia.

Menurut Central Development and Language Development Group dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa beberapa makna politik terbagi menjadi tiga yang dapat disimpulkan yaitu, pertama, politik adalah hidup bersama dalam hubungannya dengan sistem dasar pemerintahan, politik, dan aksi kolektif. Politik kedua berkaitan dengan bidang kecerdasan atau pengetahuan dan tindakan seseorang di depan sesuatu atau yang disebut pragmatisme.

Tujuan etika politik. Etika politik bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip etika yang digunakan untuk mengatur politik dalam masyarakat. Tujuan etika politik menyangkut bagaimana politisi bertanggung jawab atas tindakan politik dan legitimasi moral mereka. Etika politik juga bertujuan untuk membuat aturan dalam pengakuan kekuasaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Ruang lingkup etika politik. Dalam suatu negara, etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk pandangan hidup suatu bangsa. Etika politik memandang tanggung jawab manusia sebagai warga negara dan sebagai manusia. Ruang lingkup etika politik terbatas pada teori-teori yang membahas cara-cara yang bertanggung jawab untuk melegitimasi kegiatan politik. Etika politik tidak dibangun di atas praduga dan emosi. Prinsip dasar etika politik adalah penalaran rasional dengan sudut pandang objektif. Etika politik juga tidak terlibat dalam studi praktik politik, tetapi hanya memberikan penilaian objektif terhadap isu-isu pemikiran politik.

Urgensi etika politik. Etika merupakan nilai moral yang menjadi pedoman manusia dalam memutuskan baik dan buruk. Dalam konteks politik dewasa ini, etika menjadi pedoman bagi para politisi dan pejabat pemerintah untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan normal, aman, tertib, terkendali, maupun tidak tertib atau semrawut, tidak terlepas dari adanya etika politik. Dalam situasi kacau, etika politik semakin penting.

Pertama, etika politik berbicara kepada otoritas, yaitu, betapapun kasar dan tidak sopannya politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legalitas mengacu pada etika, nilai, hukum atau peraturan. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Kebijakan tidak adil dan mengakibatkan korban jiwa. Korban menimbulkan reaksi simpati dan kemarahan, yaitu ketakutan akan ketidakadilan dan protes. Ketiga, perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dan konflik kepentingan akan mengarah pada pengakuan akan kebutuhan akan solusi yang mendesak dan adil.

Dalam keadaan normal, etika politik juga diperlukan. Tanpa etika dan kode etik politik, sikap dan perilaku politik penyelenggara negara dan elit politik adalah organisasi kekuasaan (negara). Seperti, kesejahteraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak dapat dicapai tanpa adanya etika politik. Karena tidak ada pedoman untuk memandu tindakan pejabat pemerintah dan elit politik.

Etika politik tidak hanya terkait dengan tindakan politisi, tetapi juga dengan praktik institusi sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Singkatnya, Etika Politik berkaitan dengan setiap aspek kehidupan masyarakat. Tindakan politisi hanyalah salah satu aspek dari etika politik.

Etika politik memiliki tiga aspek: tujuan, sarana, dan tindakan politik (Haryatmoko 2003: 25). Aspek tujuan meliputi penyediaan kesejahteraan sosial dan kehidupan damai berdasarkan kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokrasi, aspek objektif etika politik menuntut pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan rakyat dan menjalankan negara dengan hidup damai. Aspek moral dari sisi objektif terletak pada kemampuan memberikan arah yang jelas bagi kebijakan publik dan akuntabilitasnya.

Dimensi "sedang" memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita. Aspek ini mencakup sistem dan prinsip dasar penyelenggaraan praktik administrasi pemerintahan dan juga menjadi dasar pranata sosial. Aspek moral dari aspek perantara ini terletak pada peran etika dalam menyelidiki dan mengkritik legitimasi keputusan, institusi, dan praktik politik. Dimensi dalam "aksi politik", aktor memainkan peran dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan kebajikan atau kualitas moral aktor. Tindakan politik dianggap rasional jika aktor berorientasi pada situasi dan memahami masalah yang dihadapi (Nimrah, & Sakaria, 2015).

Hubungan Etika-Politik Menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hubungan antara moralitas dan politik memiliki hubungan yang sangat erat, terlihat dari sudut pandang Aristoteles yang mengembangkan teori politiknya dimulai dari prinsip-prinsip politik, kode etik. Jadi, tidak hanya menjelaskan hubungan antara politik dan moralitas dengan yang lain, tetapi politik itu sendiri setara dengan moralitas dan dicapai dalam politik.

Etika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan segala aktivitas atau kegiatan manusia untuk menuju kebaikan. Dengan demikian, politik adalah sistem yang hidup berdampingan yang mengandaikan moralitas yang baik dan juga merupakan puncak kesempurnaan moral. Dengan demikian, hubungan antara politik dan moralitas menurut Aristoteles memiliki hubungan yang erat. Padahal, moralitas adalah dasar utama politik. Dengan kata lain, seperti jembatan antara politik dan moralitas.

Hubungan etika politik menurut Machiavelli. Machiavelli adalah pendiri filsafat politik modern karena dia tidak setuju dengan kenyataan atau realisme. Machiavellian adalah referensi yang jelas untuk revolusi moral politik bahwa politik dan etika terjadi dalam kenyataan atau dunia nyata dan bukan dalam kehidupan pangeran. Pendapat Machiavelli ini bertolak belakang dengan filosof klasik seperti Aristoteles, yang menurut Machiavelli politik tidak berada dalam ruang lingkup bidang etika yang merupakan keutamaan manusia. Kebijakan ini memiliki prioritas tersendiri terkait dengan kualitas negara dan ditujukan untuk menjaga stabilitas posisi dan integritas negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul.

Bagi Machiavelli, politik adalah masalah bagaimana pemimpin mengatur perilakunya terhadap masyarakat, rekan-rekannya, dan lingkungannya. Machiavelli menegaskan pandangannya bahwa ada kesenjangan antara moralitas dan politik. Machiavelli percaya bahwa sangat sulit bagi seorang pemimpin untuk memiliki perilaku atau sopan santun seorang raja, kesulitan ini berfungsi sebagai kriteria untuk ide-ide atau peraturan politik. Menurut Hobbes, hubungan antara moralitas dan politik adalah di mana moralitas mengasumsikan politik. Hal ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles berpendapat bahwa politik mengandaikan moralitas pada tahun. Konsep hubungan antara moralitas dan politik berpandangan bahwa hukum adalah bagian dari ranah sosiopolitik

## Simpulan

Etika politik merupakan salah satu komponen penting yang harus dan harus dimiliki, dipahami oleh mereka yang terlibat dalam politik atau oleh politisi. Berbicara tentang politik pasti akan melibatkan kepentingan rakyat, apalagi tidak hanya kepentingan partisipan politik, tetapi juga semua lapisan masyarakat yang tidak paham politik juga akan terpengaruh dengan cara apapun. Strategi dan Kebijakan Politik apalagi jika etika politik digunakan untuk menguji pentingnya pemimpin yang baik, maka setiap orang harus memahami etika politik. Etika politik itu sendiri berarti ketertiban, tata cara,

moralitas, baik atau buruk, dari tata cara atau tataran nyata yang digunakan oleh individu atau kelompok politik. Politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena politik merupakan suatu sistem pengaturan hubungan antar manusia dengan cara memenuhi kebutuhannya dan mengarahkannya kepada suatu tujuan bersama. Hubungan antar manusia ini tidak akan pernah putus karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga perlu diatur hubungan ini agar hubungan ini saling menguntungkan bagi semua individu orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, politik sebagai sistem pengaturan masyarakat muncul secara spontan atas dasar kebutuhan masyarakat akan politik. Saran, untuk menghindari penyimpangan politik yang berkepanjangan, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap semua instansi pemerintah. Singkatnya, pengawasan berarti proses mengamati kinerja semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan etika politik Pancasila. Karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh syarat mutlak pemerintahan dengan dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dalam pembentukan suatu bangsa.

### Referensi

- Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Prenada Media.
- Bertens K. (2007). Etika, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Derung, T. N. (2021). Upaya Pengampunan Keluarga Kristiani Menurut Injil Matius. In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi, 1(3), 74-83.
- Dhedhu, F. (2018). Politik dan Religiositas. Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik, 3(1), 21-27.
- Dwihantoro, P. (2013). Etika dan kejujuran dalam Berpolitik. Politika, 4(2), 13-21.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian, 1.
- Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(1), 79-95.
- Muhammad, N. A., & Hambali, R. Y. A. (2021). Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli. Jurnal Perspektif, 5(1), 57-73.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2), 173-181.
- Pura, J. D. L. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar. In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi, 1(1), 6-10.
- Riyantie, Y. R. (2020). Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2(3), 332-346.
- Tarihoran, E., Moi, A. Y., & Ohaq, M. (2021). Keaktifan Mengikuti Perayaan Ekaristi Dan Keterlibatan Dalam Pelayanan Stasi Santo Paulus Meluwiting Paroki Hoelea. In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi, 1(3), 100-105.
- Tawa, A. B., & Parus, D. (2021). Peranan Keluarga Single Parent Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi, 1(6), 173-177.
- Zein, F. M. (2016). Kritik Konsep Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika Politik Al Mawardi). Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 1(2), 489-507.